

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'a Effendi dan Poernomo. (2019). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Achmad Ali. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.

Aminuddin Ilmar. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bernard Arief Shidarta. (2011). *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

----- . (2016). *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Unpar Press.

Budiono Kusumohamidjojo. (2019). *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.

C.S.T Kancil. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Cekli Setya Pratiwi, et.al. (2006). *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.

Enrico Simanjuntak, et.al. (2021). *Analisis Dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum Atas Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja*

Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khusus Di Dalam Isu Hukum Fiktif Positif. Jakarta: Kencana.

H.R Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Press.

----- (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah.* Yogyakarta: FH UII Press

I Gde Pantia Astawa dan Suorin Na'a. (2012). *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Mahadi. (2003). *Falsafah Hukum Suatu Pengantar.* Bandung: Alumni.

Maria Farida Indrati. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan.* Bandung: Alumni.

Muhammad Nuruddin. (2021). *Ilmu Maqulat : Dan Esai-Esai Pilihan Seputar Logika, Kalam & Filsafat.* Depok: Keira.

Muhammad Yasin, et.al. (2017). *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.* Jakarta: Universitas Indonesia-Center For Study Of Governance And Administrative Reform (UI-CSGAR).

Mukhsan. (1992). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Ni'matul Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review.* Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

Paulus Effendi Lotulung. (1993). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sidharta dan Jufrina Rizal. (2014). *Pendulum Antinomi Hukum : Antologi 70 Tahun Valerine J.L Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Siwi Purwandari (Penerj). (2019). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia.

Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

S.F Marbun. (2014). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*. Yogyakarta: FH UII Press.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Theo Huijbers. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Thomas Tokan Pureklolon. (2022). *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Kanisius.

Titik Triwulan. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia.

W. Riawan Tjandra. (2011). *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

Azza Azka Nora. (2020). *Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontektualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun. Vol. 3 No. 2.

Dian Utami Mas Bakar dan Audyna Mayasari Muin. (2018). *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris". Vol. 2. No. 2.

Enrico Simanjuntak. (2018). *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia*. Jurnal Rechtvinding. Vol. 7. No. 2.

Eralda Methasani Cani. (2014). *Administrative Silence : Omission Of Public Administration To React As An Administrative Decision-Taking*. Juridicial Scientific Journal. Vol. 4.

M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni. (2017). *Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif*. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 2. No. 1.

Muhammad Kamil Akbar. (2020). *Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Program Magister Hukum. Vol. 1. No. 1.

Oswald Jansen. (2008). *Comparative Inventory Of Silencio Positivo*. Institute Of Constitutionnal And Administrative Law. No. 14.

Rokilah dan Sulasno. (2021). *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 1.

Rahmadian Novira dan I Gusti Ayu Putri Kartika. (2022). *Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 10. No. 9.

Tommy Sadi. (2017). *Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Lex Et Societatis. Vol. 5. No. 6.

Vera Parisio. (2013). *The Italian Administrative Procedure Act And Public Authorities*. Hamline Law Review. Vol. 36. No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Hakim

Putusan Nomor: 123/G/TF/2021/PTUN-JKT.